UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Hasil Penelitian

Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

A. Abdurahman, *Ensiklipedia Ekonomi Perdagangan dan Keuangan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991

Ali Chidir, 2005, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.

Alijoyo Antonius, dan Subarto Zaini, 2004, *Komisaris Independen, Penggerak Praktek CGC di Perusahaan*, Penerbit PT. Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.

Angela Scheeman, 1997, The Law of Corporations, Partnership, and Sole Proprietorship, Delmar Publisher, Albany.

Anggoro Teddy, 2010, *Bahan Kuliah "Teori Perusahaan"*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta

Astrid Susanto,1997, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Binacipta, Bandung.

Arikunto, S,1983, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Bina Aksara, Jakarta.

Athukorala S. Lakshman and Barry Reid, 2003, *Accrual Budgeting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries*, Asian Development Bank, Manila.

Balfas Hamud M., 2006, Hukum Pasar Modal Indonesia, Tatanusa, Jakarta,

Burhanuddin Salam, 1997, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Renika Cipta, Jakarta.

Bryan A.Garner, et.al. ed, 2004, *Black's Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co St.Paull*,

Daniri Mas Achmad, 2005, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*, , PT. Ray Indonesia, Jakarta

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Darrus Badrulzaman Mariam, 1978, Perjanjian Kredit Bank, Penerbit Alumni, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Dignam Alan dan John Lowry, 2004, Company Law, University of London, London.

Djokosantoso Moeljono, 2005, *Good Corporate Culture sebagai inti dari Good Corporate Governance*, Elex-Gramedia, Jakarta,

Djumhana Mohamad , 2003, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta

Ford H.A.J, 1990, *Principles of Company Law*, Fifth Edition, Butterworths, Sidney

Friedmann, Lawrence M, 1975, *Law's Order: What Economics Has to Do With Law an It Matters, Princeton New Jersey: Princeton University Press, USA*

----------,1967, *Legal Theory, Fifth Edition*, New York Columbia University Press.USA

----------,1998, *American Law an Introduction*, New York-London :W.W. Norton dan Company

----------, 2009, *Sitem Hukum (Perspektif Ilmu Sosial)*, Nusa Media, Bandung.

Fuady Munir, 2010, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 2005, *Perlindungan Pemegang Saham Minoritas*, CV. Utomo, Bandung.

----------, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 1999, Hukum Perbankan Modern Buku Kesatu, PT. Citra Aditya, Bandung,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

----------, 2000, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Citra Aditya, Bandung

Gamer Byan A., 2004, Black's Law Dictionary, Thomson West, Massachusetts.

Gray Kevin, 1991 `*Property in Thin Air'* 50 Cambridge Law Journal,

Hamud M. Balfas, 2006, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.

Hamilton, Robert W.,1996, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn.

Hanitijo Soemitro Ronny,1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung,

Harahap Yahya, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika*, Jakarta

Haris, Freddy, 2007, *Kedudukan Negara Sebagai Peneyertaan Modal Dalam PT Persero : Pengubahan Ketentuan Yang Tidak Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan*, Ringkasan Disertasi, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Harris Freddy dan Teddy Anggoro,2010, Hukum Perseroan Terbatas: Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi, ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.

Hartono, Sunaryati, 1998, *Hukum Ekonomi Pembangunan Ind*onesia, Binacipta, Bandung.

Hartono, Siti Sumarti, 1942, *Penunutun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Bagian Umum 1988.

Hariyani Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Elex Media, Komputindo, Gramedia Jakarta,

Hasnati, 2004, *Pernan Komite Audit dalam Organ Perseroan Terbatas dalam Kerangka Good Corporate Governance*, FH, UII Press, Yogyakarta.

Henry Hansmann & Reinier R. Kraakman, 2007, *The Anatomy of Corporate Law, A Comparive and Functional Approach, Oxford University Press, Oxford.*

Huijbers Theo, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ibrahim R, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media.

----------, 2007, *Landasan Filsofis dan Yuridis Keberadaan BUMN" ,(Sebuah Tinjauan)*, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 – NO.1.

Jenie, Siti Ismijati 2009, *Itidak baik, perkembangan dari asas hukum khusus asas hukum umum di Indonesia*, Pemikiran Guru Besar UGM dalam buku ; Bulaksumur ; Menggagas Kesejahteraan Sosial, PT. Purnagama (KAGAMA) dan IMPULSE, Kanisius , Yogyakarta.

Kamal Miko, 2013, Putusan Mahkamah Konsitusi No. 48/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstutusi, Jakarta.

Kala Anandarajah, 2004, *Basic Essentials of Corporate Governance, Lexis nexis, Utopia Press Singapura.*

Kansil C.S.T. dan Christine Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Kelly, David et.al, 2002, *Business Law, Cavendish Publishing Limited*, London.

Kelsen, Hans, 1967, *The pure theory of law*, Barkeley, University of California, Press.

----------, 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara (Dasar-dasar Ilmu Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, Bee Media Indonesia, Jakarta.

----------,2008, *Pengantar Teori Hu*kum, Nusa Media, Bandung.

Kissane, Mary E. 1997"*Global Gadflies: Applications and Implementations Of U.S. - Style Corporate Governance Abroad*", New York Law School Journal of International and Comparative Law, Volume 17.

Khaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif* Bidang Filsafat, Paradigma, Yogyakarta, 2005

Khairandy, Ridwan, 2003, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Khairandy Ridwan, 2014, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

----------,2007, dalam artikel "*Konsepsi Kekayaan negara yang dipisahkan dalam perusahaan perseroan***"** kajiannya pada Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis Volume 26- No.1.

----------,2009, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprodensi),* Kreasi Total Media, Yogyakarta.

Khairandy, Ridwan, & Camelia Malik, 2007, *Good Corporate Governance (Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif hukum),* Kencana Pernada Group, Yogyakarta.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Buku ke III Tentang Perikatan

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, 2001, Pedoman Good Corporate Governance, KNKCG, Jakarta.

Kriekhoff, Valerina J.L. 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Kumpulan Tulisan, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Krippendorff Claus, 1991, *Analisis Isi* , Rajawali Pers , Jakarta .

Kusumaatmadja, Mochtar, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT.Alumni, Bandung.

Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

Lewis, John D., tanpa tahun, *The Basic Concepts Of States Law and the Most Recent State-Law Theories.*

Lon.L. Fuller, *Anatomy of the Law, Westport*, Greenwood Press, 1976

Mahmoeddin H. As., 2002, Melacak Kredit Bermasalah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Marzuki, Peter Nahmud , 2006, *Penelitian Hukum,* Kencana; Jakarta.

Mertokusumo Sudikno, 1983, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia, Cet. 2, Liberty, Yogyakarta.

---------- 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

----------,2005, Mengenal Hukum, Edisi Kelima, Cetakan Kedua, Liberty Yogyakarta

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

----------,2006, *Penemuan Hukum(Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Michael B. Metzger, Jane P. Ma11or, A. James Barnes, 2007: Business Law and The Regulatory Environment: Concept and Cases, (Homewood, Illinois: Irwin, 9.986).

Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Nasution. S, 1992 , *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif* , Tarsito – Bandung.

Nasution, Bismar, 2003, "*Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance"* Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6.

Nugraha Safri , 2004, *Privatisation of State Enterprise in The 20th Century A Step Forwards Or Backwards?,* Jakarta: Institute For Law and Economics Studies Faculty of Law University of Indonesia.

----------,. 2007. et al, *Hukum Administrasi Negara*, cet Kesatu edisi revisi, CLGS-FHUI, Depok,

Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan (Pendekatan Ekonomi Politik),* Huma & Magister Hukum UGM, Jakarta.

Notohamidjojo, O, 1975, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan, BPK*, Gunung Mulia, Jakarta.

Paripurna, 2012, Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan Berdasarkan Prinsip Kegati-hatian di Indonesia, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pennington Robert R., 1959, The principles of company law, Butterworth, London,

Philippe, Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Sociaty in Transistion*, Herper Colophone Books, Herper & Row, New York.

Pringgodigdo A.K., 1974, Tiga Undang-Undang Dasar, PT. Pembangunan, Jakarta

Pramono Nindyo, 1999, *Hukum perbankan Book I (mengenal lembaga perbankan di Indonesia sebuah pendekatan dari perspektif Hukum Ekonomi),* Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

----------, 2006, "*Kekayaan Negara Yang dipisahkan Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dalam Permasalahan Seputar Hukum Bisnis* " Persembahan Kepada Sang Maha Guru, Sri Rejeki *et.all*, Yogyakarta.

----------,2006, *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, Citr**a** Aditya Bakti, Bandung.

Presetio, 2014, *Dilema Bumn Benturan Penerapan Bussiness Judgement Rule (BJR) Dalam Keputusan Bisnis Direksi BUMN*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta

Prasetyantoko, A, 2008, *Corporate Governance, Pendekatan Instititusional*, PT. Gramdia Pustaka Utama, Jakarta

Prasetya Rudhi, 1996, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Pound, Roscoe, 1954, *An Introduction to the Philosophy of Law*, New Haven, Yale University Press, USA.

Purwosutjipto, H.M.N.1981, *Pengertian Hukum Dagang, Jilid 1*, Djambatan, Jakarta.

Radjaguguk Erman, 2006, *Nyanyi Sunyi Kemerdekaan Menuju Indonesia Negara Hukum Demokratis,* Fakultas Hukum UI, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Depok.

----------,Artikel : "*Menyoal " Ketidakjelasan " (definsi) Uang Rakyat*, Newsletter KHN, Vol. 6, No. 2 Agustus 2006.

Rahardjo, Satjipto, 2004, *Sosiologi Hukum, (Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Rahardjo Satjipto, 1982, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung,

----------,1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahman Hassanudin 1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* , Citra Aditya Bandung.

Rawls John, 2006, *A Theory Of Justice, Harvard University Press Cambridge, Massachusetts*. Diterjemahkan, U. Fauzan dan H.Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Rivai Veithzal dan Andria Permata Rivai, 2006, *Credit Management handbook : Teori, Konsep,Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Robert W. Hamilton, 1996, *The Law of Corporation*, West Publishing Co, St. Paul, Minn, USA.

Ronny Hanitijo Soemitro,1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Sadino, Oetarid , 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnja Paramirta, Jakarta.

Sautma Hotma Bako Ronny,1995, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Deposan di Indonesia Saat ini), PT CitraAditya Bakti, Bandung,

Setiawan Boen Hendra, 2008, Bianglala Business Judgment Rule, ctk. Pertama, Tatanusa, Jakarta.

Salam, Burhanuddin, 1997, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Renika Cipta, Jakarta.

Satrio,J., 1999, *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Siamat Dahlan,1995, *Manajemen Bank Umum*, Intermedia Jakarta.

Silalahi M.Udin, *Badan Hukum & organisasi perusahaan*. Badan Penerbit Iblam Jakarta.

Simorangkir OP.,*2004, Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan NonBank*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor.

Sjawie Hasbullah F.,2013, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sjahdeini, Sutan Remy,1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia.* Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

----------,2000 " *Peranan Fungsi Kepengawasan bagi Pelaksana Good Corporate Governance,* " Tim Pakar Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Smith, M. dan Fred Skousen, 1993, *Akuntasi Intermediate,* Airlangga, Jakarta .

Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup di Indonesia,* Erlangga, Jakarta

Sugijanto, Robert Gunadi H, & Sonny Loho, 1995, *Akuntansi Pemerintahan dan Organisasi Non-Laba,* PPA FE-UNIBRAW, Malang.

Sukatendel Febby M., 2006, " *Kredit dan Masalah Keuangan*" Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia, YLBHI dan AusAID, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Peneltian, Sebuah Panduan Dasar,* Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Subekti, 1963, *Hukum, Perjanjian,* Djambatan, Jakarta.

Sunaryati Hartono, 1988, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia* , Binacipta, Anggota IKAPI, Bandung,

Suhardi, Gunarto, 2003, *Usaha Perbankan Dalam Prespektif Hukum,* Kanisius, Yogyakarta.

----------,2006, *Risiko Kriminialisasi Kredit Perbankan,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

----------,2006, *Beberapa Aspek Penting Hukum Perbankan Indonesia,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

----------,2007, *Revitalasasi BUMN,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2007

Suyatno Thomas, et all, 2003, Dasar-dasar Perkreditan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI Press, Jakarta.

----------,& Sri Mammudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

----------,2007, *Pengantar Penelitian Hukum,* Universitas Indonesia, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sony Warsono, Fitri Amalia, & Dian Kartika Rahajeng, 2009, *Corporate Governance Concept and Model,* Center for Good Corporate Governance, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1984, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Soeria, Atmadja,P.Arifin, 1986, *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis.* PT Gramedia, Jakarta

----------, *Aspek Hukum Keuangan Negara Pada Perseroan Terbatas yang Sahamnnya Anatara lain Dimiliki oleh Negara "*, (Makalah dalam diskusi Intern Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 27 Juni 2002.

----------,2004 *"Hukum Keuangan Negara(Suatu Tinjauan Yuridis Historis*), FH Universitas Indonesia.

----------,2004, Kapita Selekta Keuangan Negara : Suatu Tinjauan Yuridis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Depok

----------, 2010, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum,* Grafindo Perkasa, Jakarta,

----------,2005, *"Ruang Lingkup Keuangan Negara Menurut Pasal 23 UUD 1945" dalam Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum* , FH Universitas Indonesia.

Solomon, J, 2007, *Corporate Governance and Accountability,* Second Edition, John Wiley & Sons, West Sussex.

Supramono Gatot, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta.

Surya, Indra & Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance (Mengesampingkan Hak-Hak IstimewaDemi Kelangsungan Usaha)*, Kencana Pernada Group, Jakarta, 2006.

Sutojo Siswanto, *Menangani Kredit Bermasalah (Konsep dan Kasus)*, Damar Mulia Pustaka, 2008

Sukismo, B., 2008 " *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, PUSKUMBANGSI LEPPA UGM Yogyakarta.

Tangkilisan Hessel Nogi S., 2003, *Mengelola Kredit Berbasis " Good Corporate Govermance" ,* Balairung & Co. Yogyakarta.\

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Usman Rachmadi , 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bandung.

Vagts Detlev F.,1989, *Basic Corporation Law Materials-Cases Text*, The Foundation Press Inc. New York,

----------,Harold Koh, William Dodge, and Hannah Buxbaum, 2014, *Transnational Business Problems (University Casebook Series) 5th Edition,* Foundation Pres.

Valerina J.K.L., 2005, *Metode Penelitian Hukum, Kumpulan Tulisan*, Program Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta.

Van Apeldoorn (terj. Oetarid Sadino), 2001,*Pengantar Ilmu Hukum,* `Pradnja Paramita, Jakarta.

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto 2003, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No.6.

Warsono Sony Et.all, 2009, *Corporate Governance Concept and Model, Center For Good Corporate Governance*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Wijaya Gunawan, 2002, P*engelolaan Harta Kekayaan Negara: Suatu Tinjauan Yuridis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaya L.G. Rai, 2000, *Berbagai Peraturan Dan Pelaksanaan Undang-Undang Di Bidang Usaha; Hukum Perusahaan*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Wilamarta, Misahardi, 2002, *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate governance*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Zarkasyi Wahyudin, 2008, *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*,, Alafbeta, Bandung

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

B. Hasil Seminar dan Lokakarya

Arifin P. Soeria Atmadja, *Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dalam Implikasi Hukumnya Terhadap Risiko Fiskal*, Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, Jakarta 3 November 2008.

Badan Pemeriksa Keuangan, 2012, *dalam Diskusi Panel Terbatas: Makna Keputusan MK atas Piutang Hapus Buku Bank Negara, Selanjutnya Bagaimana?*, Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI, Jakarta.

Bismar Nasution,2006, *"Prinsip Keterbukaan dalam Good Corporate Governance"*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6, hlm.6

Claessens Stijn, 2003, "*Corporate Governance and Development Focus* I", Makalah disampaikan pada *Global Corporate Governance Forum*,

Darmabrata Wahyono dan Ari Wahyudi Hertanto 2003, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No.6

IFC, 2014 "The Indonesia Corporate Governance Manual: First Edition,"

IFC, , Jakarta

Iskandar R.Asep, "*Hukum dan Penegakan Good Governance*", Forum Keadilan, No 35. Tanggal 15 Januari 2007,

Khairandy Ridwan, "Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara," *Artikel*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009.

Djuhaendah Hasan, *Pengembangan BUMN Serta Harapan BUMN Menjadi Motor Pembangunan Perekonomian Nasional, Peringatan 70 Tahun Prof. Dr. Djuhaendah Hasan S.H.*, Jakarta,

Fred.B.G. Tumbuan, *Peran, Tugas dan Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Rancangan Undang-Undangan Perseroan Terbatas*, (Makalah disampaikan pada kongres XVI Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (PERBANAS), Jakarta Tanggal 9-22 Mei 2006.

Jusuf Anwar, Aspek-Aspek Hukum Keuangan dan Perbankan: Suatu Tinjauan Praktis, Makalah dalam Lokakarya Pembangunan

PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hukum Nasional VIII Departeman Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Nindyo Pramono, Artikel /tulisan *"Hukum perbankan Suatu Kajian Perspektif Hukum Ekonomi"* Makalah disampaikan dalam Penataran Dosen-dosen Hukum Perdata dan Ekonomi seluruh Indonesia oleh Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, tanggal 18-22 September 2000.

----------, Artikel /tulisan "*Mengenal Lembaga Perbankan Di Indonesia Sebuah Pendekatan Dari Perspektif Hukum Ekonomi*," Yogyakarta, 26 Agustus 1999

Surach Winarni, *Team Leader Credit Operation*, Bank Mandiri Cabang Yogyakarta, " *Peranan Perbankan dalam Pemberantasan Korupsi*", Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas, Hotel Santika Yogyakarta, 30 Oktober 2008.

Wilamarta Misahardi, 2002, "Hak *Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance"*, Tesis, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta

Wiangsa Wijdjaya Z, " Hapus Buku dan Hapus Tagih Piutang Negara Bank-bank BUMN", *Jurnal Hukum Bsinis* Volumne 23 No. 2 , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2004

C. Majalah dan Surat Kabar

Bismar Nasution, 2006, "Prinsip Keterbukaan dalam *Good Corporate Governance*", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 6.

Erman Radjaguguk, Menyoal "Ketidakjelasan" (definsi) Uang Rakyat, Newsletter KHN, Vol. 6, No. 2 Agustus 2006.

Erman Rajagukguk, "Menafsirkan Kembali Definisi Kekayaan Negara" Bisnis Indonesia, Kamis 9 November 2006.

Fred B. G Tumbuan, Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, Dan Pemegang Saham Menurut UU No. 1 Tahun 1995, hlm. 3, dalam Seminar sehari Bedah Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Dan Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (APKI) Jakarta, 15 November 2001.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Harian Kompas, Harian Kompas, Tanggal 14 Oktober 2008, lihat juga Krugman dalam artikel, *Krisis Ekonomi AS :Tragedi Titanic Dalam Keuangan Dunia*, Eksekutif *News* (Majalah bisnis, ekonomi dan politik), Vol. 4/25 Oktober – 25 November 2008.

Ibrahim R, *Landasan Filsofis dan Yuridis Keberadaan BUMN:Sebuah Tinjauan*, Artikel Utama Jurnal Hukum Bisnis, 2007, Volume 26 – No.1,

Krugman dalam artikel ” *Krisis Ekonomi AS : Tragedi Titanic Dalam Keuangan Dunia*, Eksekutif News (Majalah bisnis, ekonomi dan politik), Vol. 4/25 Oktober – 25 November 2008.

Sitompul Zulkarnaen, Pembatas Kepemilikan Bank: Gagasan untuk memperkuat system perbankan, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22, Juni, 2003.

Wahyono Darmabrata dan Ari Wahyudi Hertanto, *Implementasi Good Corporate Governance dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Artikel pada Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No.6, Tahun 2003.

Zimmer, Daniel, 2005 "*Legal Personality"*, dalam Ella Gepken Jager, et.all, eds, VOC 1602 - 2002: 400 Years of Company Law, Kluwer Legal Publisher, Deventer, USA.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1998 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134.Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150)

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara No. 4297)

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106; Tambahan lembaran Negara Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penataan Usahaan Modal Negara Pada BUMN. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557)

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4652.)

Peraturan Menteri Keuangan No. 87/PMK.07/2006 Tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Tanggal 24 Oktober 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 202.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184,

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum
Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 jo. adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 tentang Penilaian Kualitas Akiva Produktif Bank Umum

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/2006 tentang mediasi perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5184,

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.011/2012 Perubahan Atas Peraturan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang yang berasal dari penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 07/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 45 /POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Keputusan Gubernur BI No. 7/ 45/ PBI/ 2005 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Umum *Pasca* Bencana Alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan kabupaten Nias serta Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.

Keputusan Gubernur BI No 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank *Pasca* Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah.

Keputusan Gubernur BI No.87/84/KEP.GBI/2006 tentang Penetapan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya sebagai Daerah yang memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank; daerah di kabupaten maupun kota di **Sumatera Barat** masuk wilayah yang terkena dampak langsung bencana alam pada 30 September 2009.

Keputusan Gubernur BI No.11/60/KEP.GBI/2009 tentang Penetapan Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok sebagai Daerah diperlukan perlakuan khusus terhadap Kredit Bank.

Keputusan Gubernur BI No : 11/60/KEP.GBI/2009 tentang Penetapan Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Solok

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sebagai Daerah diperlukan perlakuan khusus terhadap Kredit Bank.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/Dpdn Tanggal 29 April 2013 Tentang Kepada Semua Bank Umum Konvensional Di Indonesia Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Kepada Semua Bank Umum Konvensional Di Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/Dpdn Tanggal 29 April 2013 Tentang Kepada Semua Bank Umum Konvensional Di Indonesia Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Kepada Semua Bank Umum Konvensional Di Indonesia

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 april 2013 Perihal Pelaksanaan G*ood Corporate Governance* Bagi Bank Umum

Surat Edaran Nose : S.9-DIR/ADK/02/2008 tentang Hapus Tagih Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa *(Force Majeur)* atau Piutang/Kredit yang telah ditetapkan PSPBDT

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk Nose: S.9b – DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan Hapus Tagih Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa (Force Majeur) atau Piutang/Kredit yang telah ditetapkan PSBDT

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk Nose: S.9b – DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan Hapus Tagih Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa (Force Majeur) atau Piutang/Kredit yang telah ditetapkan PSBDT, **Daerah Istimewa Yogyakarta** ditetapkan sebagai wilayah atau daerah yang terkena dampak langsung bencana alam via Keputusan Gubernur BI No. 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank *Pasc*a Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di Jawa Tengah.

Surat Edaran Direksi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero, Tbk Nose: S.9b – DIR/ADK/02/2008 tentang Revisi Kedua atas Ketentuan Hapus Tagih Piutang/Kredit Bermasalah Akibat Bencana Alam atau Kejadian Luar Biasa (Force Majeur) atau

PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Piutang/Kredit yang telah ditetapkan PSBDT, **Nangroe Aceh Darussalam** ditetapkan sebagai wilayah atau daerah yang terkena dampak langsung bencana alam via Keputusan Gubernur BI No. 7/45/PBI/2005 tentang Perlakuan Khusus tehadap Kredit Bank Umum Pasca Bencana Alam di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kabupaten Nias serta Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara.

Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum,

Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum

Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 77/PUU-X/2012 tanggal 25 September 2012.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1144 K/Pid/2006, tanggal 13 September 2007

Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006

Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, tanggal 25 September 2012

Putusan Mahkammah Konsitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014

Putusan Mahkammah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014

E. Bahan Internet

A. J. Boyle, 2011, *Minority Shareholders' Remedies: The rule in Foss v. Harbottle*, Cambridge University Press dalam http://assets.cambridge.org/97805217/91069/excerpt/9780521791069_excerpt.pdf diakses pada 15 Agustus 2015.

Bambang Hendarso Danuri, Ka.Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian, 2009, Diskusi Panel Ahli Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PSHP), Jakarta, Diakses terakhir tanggal tanggal 16 Mei 2009 http://www.hukum_online.com/htm. tanggal 16 Mei 2009.

Eddy OS Hiariej, Selaku Saksi Ahli dalam sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi di Mahkamah

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Konstitusi, Selasa, tanggal 10 Mei 2015, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57330adb02c1b/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor, 11Mei 2016, diakses pada tanggal 28 Juli 2017

Djiwandono Soedradjad, Mewaspadai Kredit Bermasalah**,** https://kompas.id/baca/opini/2017/04/07/ mewaspadai-kredit-bermasalah/, diakses pada tanggal 7 April 2017

Faiz, Muhammad., *Kemungkinan diajukan Perkara dengan Klausula Arbitrase ke Muka Pengadilan.* www.panmuhamadfaiz.com

Gatot Suwondo, Ketua Himbara, "kredit-macet-bank-bumn-capai-rp-88-triliun-sejak-1966" http://finance.detik.com/read/2012/12/13/125209/2117449/5/, diakses tanggal 6 Mei 2013.

Herdaru Purnomo, 2012, *Putusan MK Perbolehkan Bank BUMN Lakukan Hapus Tagih*, DetikFinance, pada laman website *http://finance.detik.com/read/2012/09/25/122109/2034775/5/putusan-mk-perbolehkan-bank-bumn-lakukan-hapus-tagih* diakses pada 2 Februari 2014.

Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan Senin, 22 Pebruari 2016 http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/02/23/112152026/Kredit.Bermasalah.Industri.Perbankan.Meningkat.Tajam, diakses tanggal 23 Pebruari 2016

Muladi, Media Indonesia, 4 Mei 2005 , http://www.antikorupsi.org/id/content/kejaksaan-agung-vs-bank-mandiri diakses pada Januari 2015

Nur, Muliadi. *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Kaitannya dengan Perjanjian Baku (Standard Contract*).www.pojokhukum.com

Pramono Nindyo, Ancaman Pidana dalam Hukum BisnisHukum bisnis adalah hukum yang tidak menakutkan bagi calon penanam saham. Prinsip *business judgment rule* seharusnya dihormati., *Artikel* pada *http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f4af449cbb9b/prof-dr-nindyo-pramono-sh--ms-brancaman-pidana-dalam-hukum-bisnis*, Senin, 27 Pebruari 2012, Diakeses pada tangga 31 Juli 2017

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Soeria Atmadja Arifin. P., Hukum Keuangan Negara Pasca 60 tahun Indonesia Merdeka": Masalah dan Prospeknya Bagi Indonesia Inc", http//www.pemantauperadilan.com/opini/

Sulistiowati, Saksi Ahli pada sidang dugaan korupsi penyimpangan kredit pada BRI dan Bank Mandiri di Pengadilan Tipikor Semarang pada Rabu, 24 Mei 2017, https://klikrdi.blogspot.co.id/2017/07/ahli-perbankan-sebut-terjadi-konflik.html, Di akses pada tanggal. 31 Juli 2017.

http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi/id/141, diakses pada 5 Maret 2017

F. Hasil- Hasil Wawancara Penelitian :

Hasil wawancara dengan Taufik Hidayat, *Vice President Wholesale Credit Recovery Group* Bank Mandiri pada 14 Maret 2015.

Hasil wawancara dengan Surach Winarni di Yogyakarta pada 15 Maret 2015.

Hasil wawancara dengan Saridatun, BNI Pusat di Jakarta, pada 2 September 2015.

Hasil wawancara dengan Andre Wijaya , Divisi Restrukturisasi Penyelesaian Kredit Bermasalah (RPKB) BRI di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2015.

Hasil wawancara dengan Kepala Divisi *Asset Management Division dan Consumer Collection and Remedial Division*, Bank Tabungan Negara (BTN) Pusat di Jakarta, 11 Agustus 2015

Hasil wawancara dengan Sugeng Purnomo, Koordinator Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada Agustus 2015.

Hasil wawancara dengan Sri Haryati,dan Tim, Humas Kepala Bagian Hubungan Lembaga Biro Humas, dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta 2017

Hasil wawancara dengan Plh. Direktur Piutang Negara , Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain, Kementerian Keuangan Republik Indonesia di Jakarta, pada tanggal 4 agutus 2015

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENTINGNYA IMPLEMENTASI PRINSIP KEMANDIRIAN DIREKSI TERHADAP PROSES PENGHAPUSAN PIUTANG BANK BUMN DI INDONESIA
HENRIKUS RENJAAN, S.H., LL.M., Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.; Prof. Dr. Siti Ismijati Jenie, S.H., CN.
Universitas Gadjah Mada, 2017 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hasil wawancara dengan Fransiska Ari Indrawati, Divisi Penasehat Hukum Stabilitas Keuangan dan Sistem Pembayaran Departemen Hukum, Bank Indonesia.